

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN
PEMILIK USAHA KECIL MENENGAH UNTUK MEMBAYAR
PAJAK PENGHASILAN PADA KOTA BANGKINANG**

SKRIPSI

OLEH



ELLEN SILVIA PRIYANTI
Nim. 10973008167



**PROGRAM S.1
JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN
PEMILIK USAHA KECIL MENENGAH UNTUK MEMBAYAR
PAJAK PENGHASILAN PADA KOTA BANGKINANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru*

OLEH

ELLEN SILVIA PRIYANTI
Nim. 10973008167



PROGRAM S.1

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2013

ABSTRAK

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN PEMILIK USAHA KECIL MENENGAH UNTUK MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN PADA KOTA BANGKINANG”

Oleh :

ELLEN SILVIA PRIYANTI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun secara simultan antara Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada pemilik usaha kecil dan menengah di kota Bangkinang. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha kecil menengah di kota Bangkinang yang berjumlah 1067 orang. Pengambilan sampel yang berjumlah 92 orang dilakukan dengan metode purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linier berganda dan data tersebut dianalisis menggunakan program SPSS 16.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan dan Tingkat Pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak, sedangkan variabel Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung $(2,160) > t$ tabel $(1,988)$ untuk variabel Kesadaran Membayar Pajak, nilai t hitung $(5,587) > t$ tabel $(1,988)$ untuk variabel Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, nilai t hitung $(0,963) < t$ tabel $(1,988)$ untuk variabel Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan dan nilai t hitung $(3,343) > t$ tabel $(1,988)$ untuk variabel Tingkat Pendidikan. Sedangkan secara simultan variabel Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung $(29,677) > F$ tabel $(2,476)$.

Kata kunci : Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Kemauan Membayar Pajak.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas selesainya tugas ilmiah ini dalam bentuk penulisan skripsi. Shalawat serta salam juga penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena merupakan teladan umat yang patut kita contohkan yang telah mengadakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar di permukaan bumi ini.

Penulis menyadari tanpa adanya ridho dari Allah SWT, penulis tidak akan dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Pemilik Usaha Kecil Menengah Untuk Membayar Pajak Penghasilan pada Kota Bangkinang.” Untuk itu penulis mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan waktu, pengetahuan dan keterampilan yang penulis miliki. Namun berkat bimbingan, petunjuk dan bantuan serta arahan dari berbagai pihak skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Sehubungan dengan itu, maka dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Mahendra Romus, SP, M. Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dony Martias, SE. MM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

4. Kedua orang tua penulis Ayahanda Anas dan Ibunda Rosmiati tersayang, serta seluruh saudara-saudara penulis tercinta Yeni, Dobby, Ranti dan Lia. Buat Si Kembar (Abang dan Adek) dan dedek Zahra yang nakal tapi lucu dan imut. Dan buat nenek ku tersayang beserta paman ku. Terimakasih untuk bantuannya selama ini, baik itu berupa bantuan moril maupun bantuan materil, serta do'anya yang selalu mendo'akan yang terbaik untuk penulis. Sampai kapanpun semuanya takkan bisa terbalaskan.
5. Bapak Mulia Sosiady, SE, MM. Ak selaku Penasehat Akademis (PA) penulis, terima kasih atas bantuan dan motivasinya selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Ibu Hj. Elisanovi SE ,MM. Ak selaku Dosen Konsultasi proposal sekaligus Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Nasir selaku Kepala Bagian Umum KPP Pratama Bangkinang beserta seluruh staff yang telah banyak memberi nasehat dan motivasi bagi penulis, serta membantu dalam memberikan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
8. Seseorang dan teman penulis Sri Suharyati dan Weni Fitriona, karna bersama kalian perjalanan kita menjadi mudah dan menyenangkan. Dan juga buat Fitri, Debi, Dona dan semua teman penulis selama mengerjakan skripsi ini makasih semuanya.

9. Teman-teman satu kos penulis Liza, Lisa, Tiara, Ayu, Sona, dan Resti. Kalian bukan hanya sahabat tapi keluarga ke 2 bagi penulis, terimakasih atas bantuan, motivasi dan semangatnya selama ini.
10. Teman seperjuangan Akn-E Lovers dan semua teman-teman sekelas Konsentarsi Ak_Perpajakan “angkatan 2009” yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan do’anya yang tulus dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Semoga Allah SWT memberikan Hidayah-Nya atas apa yang telah diberikan kepada penulis serta mendapat balasan yang setimpal dengan amal. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Pekanbaru, 3 Februari 2013

Ellen Silvia Priyanti

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DATAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4. Sistematika Penulisan	7

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1. Pajak	9
2.1.1. Pengertian Pajak	9
2.1.2. Jenis Pajak	10
2.1.3. Fungsi Pajak	12
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak	12
2.2. Pajak Penghasilan	14
2.2.1. Subjek Pajak Penghasilan	15
2.2.2. Objek Pajak Penghasilan	15
2.2.3. Dasar Pengenaan Pajak	16
2.2.4. Penghasilan Tidak Kena Pajak	17
2.2.5. Tarif Pajak	18
2.3. Kewajiban Wajib Pajak	18
2.4. Pandangan Islam tentang Pajak	21
2.5. Usaha Kecil Menengah	23
2.5.1. Pengertian Usaha Kecil Menengah	23
2.5.2. Ciri-ciri Usaha Kecil Menengah di Indonesia	25
2.5.3. Kriteria Usaha Kecil Menengah	26
2.6. Kemauan Membayar Pajak	26
2.7. Model Penelitian	35
2.8. Pengembangan Hipotesis	36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	42
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian	42
3.3. Jenis dan Sumber Data	43

3.4. Metode Pengumpulan Data	43
3.5. Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	44
3.6. Metode Analisis Data.....	46
3.6.1. Uji Kualitas Data.....	46
3.6.2. Uji Normalitas	47
3.6.3. Uji Asumsi Klasik	48
3.6.4. Uji Hipotesis	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi dan Analisis Data.....	52
4.2. Analisis Data	55
4.2.1. Analisis Uji Kualitas Data	55
4.2.2. Analisis Uji Normalitas.....	58
4.2.3. Analisis Uji Asumsi Klasik.....	60
a. Analisis Uji Multikolinearitas	60
b. Analisis Uji Heterokedastisitas	61
c. Analisis Uji Autokorelasi	62
4.2.4. Analisis Hipotesis	63
a. Uji Regresi Secara Parsial	65
b. Uji Regresi Secara Simultan	66
c. Uji Korelasi Ganda (R).....	68
d. Koefisien Determinasi (R^2).....	68
4.3. Pembahasan	70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Penerimaan perpajakan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun secara persentase terhadap seluruh pendapatan negara dari tahun ketahun. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk mau membayar pajak.

Pembenahan sektor pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara agaknya masih membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebutkan, hingga pertengahan 2012, masih ada 35 juta orang dan 12,9 juta perusahaan yang belum membayar pajak.

Pemungutan pajak bukan suatu pekerjaan yang mudah. Begitu besarnya peran pajak bagi penerimaan negara, memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak tersebut ,Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya melakukan usaha ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak baru, sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan

dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Namun usaha ini tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri.

Penerapan *Self Assessment System* di Indonesia, memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung dan menyetor sendiri pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak terutang yang telah dibayar sebagai mana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Hal ini menyebabkan kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penerimaan pajak tersebut.

Kurangnya kemauan masyarakat dalam membayar pajak dapat dilihat dari masih banyaknya wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi pada pekerja profesional. Sedangkan perkembangan usaha kecil dan menengah khususnya pada kota-kota kecil saat ini sangat dinamis, tapi jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha kecil menengah masih belum terdaftar sebagai wajib pajak. Semua ini terjadi karena masih sangat rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Tabel I.1 Data Usaha Kecil Menengah di Kota Bangkinang
Yang Terdaftar di KPP Pratama Bangkinang sampai tahun 2011

No	Jenis Usaha	Jumlah usaha yang terdaftar	Proporsi
1	Jasa perorangan	476	44,61 %
2	Pedagang besar	97	9,09 %
3	Pedagang eceran	431	40,39 %
4	Jasa fotografi	4	0,37 %
5	Jasa penjahit	7	86,70 %
6	Salon kecantikan	7	77,94 %
7	Pembenihan biota air tawar	1	0,09 %
8	Pembibitan dan Budi daya ayam ras	1	0,09 %
9	Perkebunan karet	1	0,09 %
10	Perkebunan kelapa sawit	7	0,65 %
11	Pergudangan	1	0,09 %
12	Jasa boga	31	2,90 %
13	Persewahan mesin dan alat transportasi	3	0,28 %
	Jumlah	1067	100 %

Sumber : data KPP Pratama Bangkinang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa proporsi usaha kecil menengah yang terdapat di kota Bangkinang dan telah terdaftar di KPP Pratama Bangkinang sampai akhir tahun 2011 berjumlah 1067 wajib pajak. Namun pada kenyataannya masih banyak sekali usaha kecil menengah lainnya yang memiliki potensi untuk membayar pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakan mereka.

Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak tersebut adalah asas perpajakan itu sendiri, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari membayar pajak.

Undang-undang tentang perpajakan telah menjelaskan ancaman, hukuman, maupun sanksi yang cukup jelas terhadap wajib pajak yang tidak taat dan mengabaikan kewajiban perpajakan mereka. Tetapi pada realitanya semua itu tidak cukup untuk membuat wajib pajak mau menjalankannya kewajibannya sebagai wajib pajak. Banyak sekali wajib pajak yang terus berusaha mencari celah untuk menghindar dari pajak ataupun melakukan kesepakatan dengan oknum pajak untuk mencari celah agar bisa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarnya.

Widayati (2010) melakukan penelitian tentang *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas pada KPP Prata Gambir Tiga* dengan hasil menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi pada KPP Prata Gambir Tiga. Tapi faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Zulia Hanum (2010) melakukan penelitian Tentang *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Daerah Kota Medan* dengan hasil menunjukkan bahwa faktor pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak akan peraturan

perpajakan dan manfaat yang dirasakan wajib pajak dari pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian ini mencoba meneliti kembali penelitian yang dilakukan oleh Widayati (2010) dengan merubah tempat penelitian yaitu di kota Bangkinang. Namun jika Widayati menjadikan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sebagai objek penelitian, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah pemilik usaha kecil menengah yang ada di kota Bangkinang. Hal ini karena untuk kota kecil seperti kota Bangkinang saat ini perekonomian masyarakat lebih didominasi oleh usaha kecil menengah.

Penelitian ini juga menambahkan satu variabel yaitu tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak. Variabel tingkat pendidikan ini peneliti ambil berdasarkan penelitian Zulia Hanum (2010) yang mengatakan bahwa banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap wajib pajak untuk tidak menjadi wajib pajak yang baik, salah satu faktor yang berpengaruh tersebut dapat berasal dari faktor akademik, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak lewat pendidikan yang lebih tinggi seharusnya memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan yang lebih baik dibanding dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih rendah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian yang hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN PEMILIK USAHA KECIL MENENGAH UNTUK MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN PADA KOTA BANGKINANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak.
2. Apakah pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak.
3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak.
4. Apakah tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak.
2. Untuk mengetahui apakah pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak.
3. Untuk mengetahui apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak.

4. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis.
2. Bagi pembaca, diharapkan dapat dijadikan suatu sumbangan pikiran dan masukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan pemilik usaha kecil menengah untuk membayar pajak.
3. Bagi peneliti lain, sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan kajian lebih luas dalam bahasan ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab akan membahas permasalahan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini akan dibahas tentang tinjauan pustaka, yang menguraikan beberapa teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu tentang Pajak, Kewajiban Wajib Pajak, Pajak Menurut Syari'ah, Usaha Kecil dan Menengah, Kemauan Membayar Pajak beserta variabel-variabel yang mempengaruhi kemauan wajib pajak membayar pajak, Model Penelitian Pengembangan Hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan skala pengukuran, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan melakukan analisis mengenai pengaruh variabel-variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakandan tingkat pendidikan terhadap kemauan membayar pajak pemilik usaha kecil menengah di Kota Bangkinang, yang dilakukan dengan uji SPSS.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab terakhir ini, penulis mencoba menarik kesimpulan dan mencoba untuk memberi saran yang diharapkan berguna.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik (Suandy 2006:2). Yang dimaksud dengan pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan 2005:10).

Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegenprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Siti dan Eli 2009:1)

Pajak sebagai salah satu penerimaan negara yang sangat penting dalam pembangunan. Dalam hal pengertian pajak ini, para ahli telah memberikan suatu batasan. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung, dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo dan Ilyas 2003: 4).

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membayar pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelesaikan tugas pemerintah (Siahaan 2005:5).

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak sebagai:

- a. Iuran dari masyarakat kepada pemerintah.
- b. Pajak dipungut oleh pemerintah, berdasarkan undang-undang serta aturan-aturan.
- c. Tidak ada timbal balik secara langsung dari pemerintah kepada wajib pajak.
- d. Sifatnya yang dapat memaksa.
- e. Pajak digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran negara.

2.1.2 Jenis Pajak

Dalam Mardiasmo (2008:5) pajak dikelompokkan menurut beberapa kategori yaitu:

- a. Menurut Golongannya
 - 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak akan dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

- a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

2.1.3 Fungsi Pajak

Sebagai mana diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai defenisi, terlihat adanya dua fungsi pajak (Waluyo dan Ilyas 2003:8) yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011 : 17) ada tiga macam sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu :

a. *Official Asseesmen System*

Official Asseesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang pada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak

Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah :

- 1) Wewenang untuk menenurukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.

- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Hutang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak (SKP) oleh fiskus.

b. Self Assesmen System

Self Assesmen System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus di bayar.

Ciri-cirinya adalah :

- 1) Wewenang untuk menuntukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak (wajib pajak yang aktif).
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak dapat ikut campur dan hanya mengawasi (fiskus pasif).
Aparat pajak hanya bertugas untuk memberikan penyuluhan, penerangan, pengawasan maupun sebagai verifikasi.

Self Assesment System ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) *Semi Self Asseesment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang pada awal tahun sebagai perhitungan sementara dan setelah periode (tahun tersebut berakhir), pajak yang sesungguhnya ditentukan oleh fiskus.
- b) *Fully assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak yang teruatng baik

awal tahun maupun akhir tahun pajak. Perhitungan pada awal tahun pajak merupakan perhitungan sementara dan pajak yang telah dibayar pada tahun berjalan nantinya diperhitungkan sebagai kredit pajak terhadap hutang pajak yang sesungguhnya menurut perhitungan setelah tahun pajak berakhir. Dalam Sistem ini fiskus tidak turut ikut campur dalam menentukan besarnya pajak yang terutang, kecuali apabila wajib pajak menyalahi peraturan yang berlaku.

c. With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2 Pajak Penghasilan

Menurut golongannya pajak penghasilan digolongkan kepada pajak langsung dikarenakan pajak ini harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Dan menurut sifatnya, pajak penghasilan adalah pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Sedangkan berdasarkan lembaga pemungutannya pajak penghasilan termasuk kedalam pajak pusat (pajak negara) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Apabila seseorang atau badan hukum termasuk subjek pajak, dan menerima penghasilan yang merupakan objek

pajak, maka subjek pajak tersebut menjadi wajib pajak. Oleh karena itu, wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan wajib membayar pajak Penghasilan.

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi Subjek Pajak adalah:

- a. 1). Orang pribadi
 - 2). Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- a. Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, dan bentuk badan lainnya.
- b. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. laba usaha.
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen.
- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.2.3 Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto.

Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

$\text{Penghasilan kena pajak (WP Badan)} = \text{penghasilan netto}$

$\text{Penghasilan kena pajak (WP orang pribadi)} = \text{penghasilan netto} - \text{PTKP}$

2.2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 162/PMK.011/2012 terhitung mulai 1 Januari 2013, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Rp 24.300.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- b. Rp 2.025.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
- c. Rp 24.300.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp 2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga sementara dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

2.2.5 Tarif Pajak

Sesuai dengan pasal 17 UU PPh, besarnya tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %
Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15 %
Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25 %
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

- 2) Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Untuk Wajib Pajak badan dikenakan tarif pajak tunggal sebesar 25%.

2.3 Kewajiban Wajib Pajak

Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nugroho dan Teguh 2008: 12-33), yaitu :

1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha kena Pajak (NPPKP)

Undang-undang perpajakan telah menegaskan bahwa sesuai dengan *self assessment system*, setiap wajib pajak berkewajiban mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan penyetoran pajak sendiri, dan juga melaporkan pajak sendiri atas utang pajaknya ke kantor pajak. Apabila telah memenuhi syarat tertentu, selain NPWP, wajib pajak juga berkewajiban melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP),

meskipun tidak semua wajib pajak yang ber-NPWP harus mempunyai NPPKP.

Pihak-pihak yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah :

- a) Orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerja sebagai pegawai atau pensiun.
- b) Orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha yang dijalankannya.
- c) Suami istri yang mengadakan perjanjian Pisah Harta (PH).
- d) Suami istri yang berdasarkan putusan pengadilan negeri mengadakan perjanjian hidup berpisah, tetapi belum bercerai.
- e) Orang pribadi asing yang mempunyai niat tinggal di Indonesia melebihi 183 hari.
- f) Kuasa warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan yang kedudukannya sebagai wajib pajak pengganti.
- g) Bendaharawan pemerintah, sebagai Wajib Pungut (WAPU).
- h) Badan usaha
- i) Bentuk usaha tetap.

Adapun kriteria wajib pajak yang di kukuhkan sebagai PKP untuk memperoleh NPPKP adalah :

- a) Wajib pajak dalam usahanya menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP), dengan omset pada bulan tertentu dalam satu tahun telah melampaui Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

- b) Wajib pajak yang dalam usahanya menyerahkan jasa kena pajak dengan omset dalam satu tahun tertentu telah melampaui Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- c) Wajib pajak pedagang eceran, apabila omset usahanya dalam satu tahun telah melampaui Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- d) Jasa lain-lain, meskipun belum melampaui Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) wajib melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Seperti wajib pajak yang memiliki biro perjalanan wisata (BPW), jasa pengiriman paket, dan jasa anjang piutang (*factoring*).

2. Kewajiban melakukan pembukuan/pencatatan

Kewajiban kedua wajib pajak adalah melakukan pembukuan atau pencatatan. Pembukuan berbeda dengan pencatatan. Hasil akhir dari proses pembukuan adalah dua macam laporan keuangan, yaitu neraca keuangan dan laporan laba rugi, sedangkan pada pencatatan tidak akan ada laporan keuangan. Pada pencatatan, biaya yang dikeluarkan tidak akan diperhitungkan dalam perhitungan pajak, karena pada pencatatan yang dicatat hanya peredaran atau penerimaan bruto atau pengasilan bruto, karena penentuan besarnya pajak yang terutang ditentukan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto.

Pihak yang wajib melakukan pembukuan adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak orang pribadi dengan omset lebih dari Rp 1,8 Milyar
- b. Wajib pajak badan
- c. Bentuk usaha tetap

3. Kewajiban melakukan pembayaran/penyetoran pajak tepat waktu

Kewajiban ketiga wajib pajak adalah melakukan penyetoran atau pembayaran pajak. Pada dasarnya didalam pelunasan pajak terdapat dua macam cara pelunasan yaitu :

- a. Pelunasan dilakukan melalui pihak lain atau yang disebut dengan “penyetoran”, yaitu dengan cara pemotongan/pemungutan oleh pemberi penghasilan dan disetorkan oleh pemotong/pemungut yang bersangkutan.
- b. Pelunasan yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau yang disebut dengan dengan “pembayaran”. Pada cara ini wajib pajak menghitung dan melunasi pajak sendiri.

4. Kewajiban melaporkan pajak

Kewajiban wajib pajak yang keempat adalah melaporkan pajak yang telah disetorkan. Pelaporan pajak dibagi berdasarkan waktu, yaitu pelaporan bulanan dan pelaporan tahunan.

2.4 Pandangan Islam tentang Pajak

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (muamalah), oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syariah. Tanpa adanya rambu-rambu syariah dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat (kaum muslim). Tanpa batasan syariah, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan menggunakannya menurut apa yang di inginkannya (pajak dianggap sebagai upeti / hak milik penuh sang raja).

Hanya syariah yang boleh menjadi pemutus perkara, apakah suatu jenis pajak boleh dipungut atau tidak. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut

syariah (apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT), maka dia adalah zalim.

Seperti yang disebutkan dalam Q.S Al-maidah ayat 45 berikut ini :



Artinya : *“Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”*
(Q.S Al-Maidah :45)

Oleh karena pajak adalah bagian dari syariah, maka sebagai batang dari suatu pohon, ia harus memiliki akar yang kuat. Akar itu adalah iman atau aqidah. Hukum pajak mesti memiliki landasan/akar (dalil) yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Jika ia memiliki landasan yang Al-qur'an dan hadist, tentu ia akan memberi manfaat (buah) bagi kemaslahatan umat.

Menurut ulama Abdul Qadi Zallum, pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul amal tidak ada uang atau harta (Gusfahmi 2007:32).

Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh kaum muslimin selama itu kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupann yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, pertahanan dan keamanan dibidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.

Alasan kaum muslim memunaikan pajak yang ditetapkan negara, disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas dan tolong

menolong. Sesama kaum muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan taqwa merupakan kewajiban yang harus terpenuhi.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195 :



Artinya : *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

Atas alasan tersebut, maka dua kewajiban kaum muslim (terutama kaum muslim di Indonesia) yaitu membayar zakat dan pajak adalah sah dan dibolehkan menurut Islam.

2.5 Usaha Kecil Menengah

2.5.1 Pengertian Usaha Kecil Menengah

a. Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998

Pengertian usaha kecil menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

b. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Pengertian usaha kecil menengah berdasarkan kuantitas tenaga kerja.

Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki usaha jumlah tenaga kerja lima sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah

merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

- c. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994

Usaha kecil menengah didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai penjualan atau omset pertahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000,- atau asset atau aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000,- (diluar tanah dan bangunan yang ditempati), terdiri dari :

1. Bidang usaha FA, CV, PT, dan Koperasi)
2. Perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, peramba hutan, penambang, pedagang barang dan jasa)

- d. Menurut UU No. 20 tahun 2008

Pengertian usaha kecil menengah menurut Pasal 1 UU No. 20 tahun 2008 membagi kedalam dua pengertian yakni :

1. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2.5.2 Ciri-Ciri Usaha Kecil Menengah di Indonesia

Ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas usaha mikro kecil menengah yang ada di Indonesia (Tuti :2011), antara lain :

- a. Mempunyai usaha yang kecil baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar.
- b. Status usaha milik pribadi.
- c. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan social budaya (etnis, geografis) yang direkrut melalui pola pemagangan atau pihak ketiga.
- d. Banyak berlokasi dipedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota besar.
- e. Pola kerja sering kali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan ekonomi lainnya.
- f. Izin usaha sama sekali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi.
- g. Strategi perusahaan sangat di pengaruhi oleh kondisi lingkungan yang strategis dan berubah secara cepat
- h. Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha dan administrasi sederhana.
- i. Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja serta sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi.

2.5.3 Kriteria Usaha Kecil dan Menengah

Sesuai dengan Pasal 6 UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil Menengah (UKM) (Tulus 2009:16) :

- a. Usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 - 1) Kekeyaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d Rp 2.500.000.000,-.
- b. Usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 - 1) Kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-.

Tabel II.1 Kriteria Usaha Kecil dan Menengah

No	Uraian	Criteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Kecil	>50 juta -500 juta	>300 juta- 2,5 Milyar
2	Usaha Menengah	>500 juta -10 Miliar	> 2,5 Milyar – 50 Milyar

Sumber : Tulus Tambunan. UMKM di Indonesia (2009)

2.6 Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*)

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakan dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya (Rahayu

2010:142). Erard dan feinstin menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu ;

1. rasa malu,
2. persepsi wajib pajak atas kewajaran dan rasa keadilan beban pajak yang mereka tanggung,
3. pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak di pengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Devano dan Rahayu 2006:112). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung pada masalah teknik saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknik pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara dalam hal membayar pajak. Di samping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak dalam membayar pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemauan merupakan salah satu fungsi hidup jiwa manusia, dapat diartikan sebagai aktifitas fisik yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan tujuan. Menurut Erly Suandy (2002:95) kemauan membayar pajak artinya wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi untuk membayar pajak terutangnya.

Vanesa dan Hari (2009) dalam Widayati (2010) menyatakan kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai (dalam bentuk materi) yang rela dikorbankan dan dikontribusikan oleh seseorang yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dan untuk kepentingan masyarakat umum, namun tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) secara langsung.

Forest dan Sheffrin (2002) dalam Rahayu (2010:140) menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang *simplifying* sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Sedangkan Fallan (1999) dalam Rahayu (2010:141) menyatakan aspek pengetahuan perpajakan wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Kesadaran masyarakat akan meningkat bila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berpengaruh positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Salah satu penelitian di Chile, Amerika Laten yang dilakukan oleh Jaime V.Caro (Safri Nurmantu 2005:154) menunjukkan delapan sebab mengapa seseorang tidak mau membayar pajak, di bawah judul: Why I don't want to pay tax, yaitu :

1. Karena saya tidak menerima manfaat.
2. Karena tetangga saya juga tidak membayar pajak.

3. Karena jumlah pajaknya terlalu besar.
4. Karena mereka mencuri uang saya
5. Karena saya tidak tahu bagaimana melaksanakannya.
6. Karena saya telah mencoba tapi saya tidak mampu.
7. Karena jika mereka menangkap saya, maka saya akan dapat menyelesaikannya.
8. Walaupun saya tidak bayar, tidak kan terjadi apa-apa.

Alasan pertama, dan kedelapan menekankan bahwa alasan mereka tidak mau membayar pajak adalah karena mereka tidak memiliki kesadaran tentang manfaat dari pembayaran pajak, sedangkan alasan kelima dan keenam menerangkan bahwa mereka tidak memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan hingga tidak tahu bagaimana melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Dalam teori atribusi (*attribution theory*) dipelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, dan kekuatan eksternal (*external forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar (Arfan dan Ishak 2005:55). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Penelitian tentang kemauan membayar pajak telah banyak dilakukan. Dikaitkan dengan penelitian ini, *attribution theory* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam melakukan sesuatu, ada faktor internal dan faktor eksternal yang akan mempengaruhi individu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Dalam penelitian ini, hal tersebut dikaitkan dengan kesadaran wajib pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pendidikan yang dimiliki oleh seorang individu sebagai wajib pajak akan mempengaruhi kemauan individu tersebut untuk membayar pajak.

Berdasarkan teori-teori yang relevan dan penelitian-penelitian yang telah dijelaskan diatas, berikut ini akan mengkaji lebih jauh tentang faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Adapun penjelasan untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

2.6.1 Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran merupakan suatu proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan sehingga mendapatkan keyakinan diri yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan.

Perilaku ini merujuk kepada tingkat keseriusan individu terhadap rencana pencapaian tujuan dari organisasi. Individu yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi cenderung akan memiliki perhatian yang serius terhadap pekerjaan dan oleh karena kerjanya terorganisir dikarenakan

perhatiannya tidak bercabang kemana-mana. Sebaliknya, individu yang tingkat kesadaran rendah maka perhatiannya terhadap pekerjaan relatif kurang dan oleh karenanya kurang terorganisasi dan kurang focus.

Menurut Erly Suandy (2002:95) kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

Safri Nurmantu (2005:103) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban untuk membayar pajak.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami fakta kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk membiayai negara.

Irianto (2005) dalam Widayati (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan

pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2.6.2 Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.

Widayati (2010) menguraikan beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pertama, kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai sarana untuk pengadministrasian pajak. Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.

Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka

semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Kelima, wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang keenam bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

2.6.3 Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Didalam Kamus Bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. Sedangkan menurut G.Sihiffman dan Leslie Lazar Kanuk, persepsi diartikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur dan menafsirkan kedalam gambar yang berarti masuk mengenai dunia (Muflih 2006:92).

Sedangkan menurut Krech, persepsi adalah suatu proses kognitif dan kompleks dan menghasilkan gambar yang unik tentang kenyataan yang barang kali sangat berbeda dari kenyataannya (Rakhmat, 2007:5).

Dalam penelitian Widayati (2010), persepsi juga dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas

memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain pertama, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling, dan drop box. Wajib Pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat, serta dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Kedua, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Dan yang keempat, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.

2.6.4 Tingkat Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek-objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) pendidikan merupakan suatu proses pengubahan sikap dan tata laku

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, sebagai bentuk pembinaan proses perkembangan manusia untuk berpikir dan cenderung berkembangnya kemampuan dasar yang ada padanya untuk mempersiapkan individu siap bekerja serta sebagai indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan.

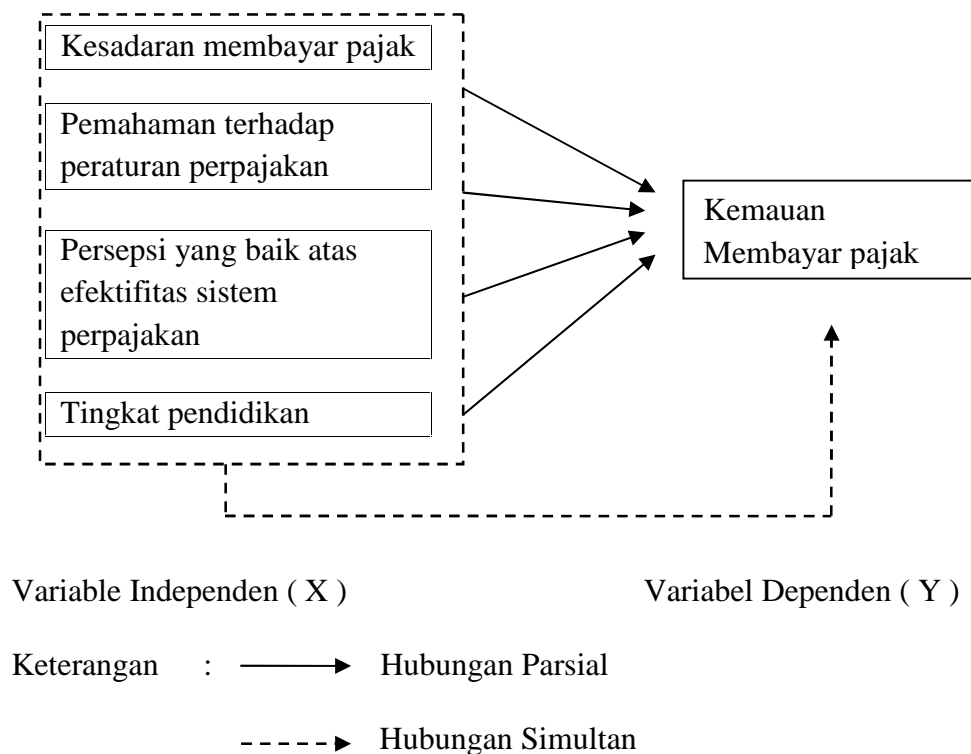
Banyak faktor yang berpengaruh terhadap wajib pajak untuk tidak menjadi wajib pajak yang baik. Salah satu faktor yang berpengaruh tersebut dapat berasal dari faktor akademik ataupun tingkat pendidikan. Selama dalam tingkat pendidikan setiap individu akan melalui sebuah proses belajar mengajar. Axelrood (1996) diadaptasi oleh Bulu (2002) diadaptasi oleh Titien (2010) mendefinisikan proses belajar mengajar sebagai proses pengembangan pribadi manusia. Dalam mengembangkan pribadi berarti tidak hanya ranah kognisi yang berkembang, tetapi juga ranah emosional.

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak lewat pendidikan yang lebih tinggi seharusnya memiliki kesadaran perpajakan (kemauan membayar pajak) yang lebih baik dibanding dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih rendah.

2.7 Model Penelitian

Untuk menyatakan hubungan antar konsep dan menggambarkan hipotesa dalam penelitian, hipotesis penelitian di atas dapat dirangkum dalam model penelitian sebagai berikut:

Gambar II. 1 Model Penelitian



Dalam penelitian ini yang menjadi variable dependen adalah kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak. Sedang yang menjadi variable independen dalam penelitian ini adalah:

1. Kesadaran membayar pajak
2. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan
3. Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan
4. Tingkat pendidikan

2.8 Pengembangan Hipotesis

Penelitian mengenai kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak sangat menarik. Kita dapat melihat sendiri di masyarakat banyak sekali pemilik usaha kecil dan menengah yang potensial untuk menjadi wajib pajak namun belum mempunyai kemauan untuk membayar pajak dan belum

terdaftar sebagai wajib pajak. Karena Indonesia memakai sistem *self assessment system* maka kemauan pemilik usaha kecil dan menengah itu sendiri untuk membayar pajak sangat dibutuhkan. Beberapa variabel yang akan di uji dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak

Pada hakikatnya kesadaran membayar pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam keadaan tahu, mengerti, dan tidak merasa dipaksa ataupun takut dalam melaksanakan kewajibannya, karena adanya nilai-nilai hukum dalam diri wajib pajak dan adanya pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.

Safri Nurmantu (2005:103). Menyatakan bahwa kesadaran perpajakan menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban untuk membayar pajak.

Liana Ekawati (2009), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana dimana wajib pajak mengetahui, mematuhi, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seakrela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Pancawati (2011) menunjukkan kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan penelitian Widayati (2010) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

2. Pengaruh pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham akan peraturan perpajakan dengan baik, akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum didalam peraturan yang ada.

Pada Harian Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2011 menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan sangat kecil. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan sangat baik biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan juga dapat dilihat dari kemauan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pancawati (2011) menunjukkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan penelitian Fery Dwi Prasetyo (2006) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak pada peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Semakin besar pemahaman terhadap perpajakan maka semakin besar kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

3. Pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

Persepsi menurut Rakhmat Jalaluddin (2002:51) adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintegrasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai.

Persepsi wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak dilakukan oleh Maria Karanta,et,al (2000 dalam Suryadi 2006) menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja Badan Perpajakan Nasional Swedia, ini dilihat dari: kesadaran prosedur yang bermanfaat bagi wajib pajak, kebutuhan bagi wajib pajak, perlakuan yang adil, keahlian aparat dalam mendeteksi kesalahan,serta dalam mengoreksi laporan pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak yang positif dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak.

Dari teori yang di kemukakan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan akan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

4. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemauan membayar pajak.

Pada dasarnya pendidikan adalah perbuatan mendidik, sedangkan mendidik itu sendiri berarti membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dengan sengaja agar menjadi seseorang yang dewasa bertingkah laku baik, budi pekerti yang luhur sehingga timbul kesadarannya guna berbakti kepada kedua orang tua, bangsa dan tanah air.

John Dewey memberikan definisi pendidikan sebagai suatu proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional secara alami antar sesama individu.

Pendidikan di jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan berjenjang. Berdasarkan UU RI No. 20/2003 mengenai jenjang pendidikan dijelaskan : “jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah dan pendidikan tinggi”.

Pancawati (2011) menyatakan pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Zulia Hanum (2010) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak lewat pendidikan yang lebih tinggi seharusnya memiliki kesadaran perpajakan (kemauan membayar pajak) yang dimiliki lebih baik dibanding dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih rendah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak akan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan empat dimensi dari Kemauan Membayar Pajak tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. H1 : Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
2. H2 : Pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
3. H3 : Persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
4. H4 : Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
5. H5 : Kesadaran membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain *asosiatif kausal*. Menurut Umar (2003:30) “*Desain kausal* berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel riset atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain”.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Arikunto (2002:115) Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki usaha kecil menengah di kota Bangkinang yang telah terdaftar di KPP Pratama Bangkinag yaitu berjumlah 1.067 orang . Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel adalah *purphosive sampling* yaitu sampel diambil secara acak dengan kriteria wajib pajak memiliki usaha kecil menengah di kota Bangkinang .

Penentuan jumlah sampling yang diambil dengan menggunakan Teori Slovin (Umar, 2004: 92) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel) sebesar 10%.

Berdasarkan jumlah wajib pajak yang memiliki usaha kecil menengah pada kota Bangkinang, maka sampel yang diperlukan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{1.067}{1+1.067 (0,01)}$$

$$n = \frac{1.067}{11,67} = 91,43 = 92 \text{ orang}$$

Jadi, jumlah sampel yang akan di teliti adalah sebanyak 92 orang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dalam penelitian ini adalah:

- a) Data Primer adalah data yang penulis kumpulkan sendiri dari pihak ketiga dengan cara menyebarkan kuisioner dan wawancara langsung kepada responden yang terpilih.
- b) Data Sekunder adalah data yang penulis dari pihak ketiga tidak secara langsung, dalam bentuk data melalui Kantor Pelayanan Pajak Bangkinang, serta melalui studi kepustakaan, peraturan Perundang-undangan, dan buku-buku yang relevan serta literatur lainnya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara:

1. Observasi yaitu meliputi pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas kemudian dibandingkan dengan teori yang dikemukakan.
2. Kuesioner yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada responden untuk diisi yang sesuai dengan keperluan penelitian.

3.5 Operasioanal Variabel dan Pengukuran Variabel

Konsep-konsep yang akan diukur dalam penelitian ini adalah keempat faktor-faktor kemauan membayar pajak (*Willingness to Pay Tax*). Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator empirik yang telah disiapkan. Pertanyaan-pertanyaan yang akan dicantumkan dalam kuesioner akan dikembangkan sesuai dengan indikator empirik yang digunakan dalam pengukuran konsep.

Variabel-variabel yang diukur tersebut adalah:

1. Kesadaran membayar pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mematuhi dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara sukarela (Liana Ekawati :2009).

Variabel ini di ukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1) Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara
- 2) Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara
- 3) Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan
- 4) Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara (Widayati: 2010).

2. Pemahaman akan peraturan perpajakan

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib

pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan maka cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat (Pancawati: 2011)

Variabel ini di ukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan
- 2) Pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan
- 3) Pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan
- 4) Pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak
- 5) Pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi dan training

(Widayati: 2010)

3. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginteprestasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai.

Variabel ini di ukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1) Pembayaran pajak melalui e-Banking
- 2) Penyampaian SPT melalui e-SPT , e-Filling dan drop box
- 3) Update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet.
- 4) Pendaftaran NPWP melalui e-register (Widayati: 2010)

4. Tingkat Pendidikan

Pendidikan wajib pajak merupakan dasar pengetahuan wajib pajak dalam merespon segala informasi tentang hakikat dan makna pembayaran

pajak bagi kepentingan pembangunan nasional. Zulia Hanum (2010) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak lewat pendidikan yang lebih tinggi seharusnya memiliki kesadaran perpajakan (kemauan membayar pajak) yang dimiliki lebih baik dibanding dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih rendah.

Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1) Tinggi rendahnya pendidikan wajib pajak (Edy Riyono : 2011)
5. Kemauan membayar pajak

Membayar pajak sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi) secara langsung (Widayati: 2010).

Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1) Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak
- 2) Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak
- 3) Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak
- 4) Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak
- 5) Membuat alokasi dana untuk membayar pajak

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Uji Kualitas Data

3.6.1.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Pada program SPSS teknik

pengujian yang sering digunakan pada penelitian untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi *Bi-variate Person* (Produk Momen Pearson) dan *Corrected Item- Total Correlation*.

Pengujian ini menggunakan taraf signifikansi 0,05. Criteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika $r_{\text{hitung}} \geq r_{\text{table}}$, maka instrument atau item-item pertanyaan signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
2. Jika $r_{\text{hitung}} < r_{\text{table}}$, maka instrument atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukuran yang di gunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dalam program SPSS metode yang akan digunakan adalah metode *Alpha (Cronbach's)*. Dimana suatu instrument dapat dikatakan reliabilitas bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar (a) 0,6 adalah tidak reliabel, (b) 0,6-0,7 acceptable, (c) 0,7-0,8 baik, dan (d) $> 0,8$ adalah sangat baik.

2.6.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terkait dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal ataukah tidak, maka dapat dilakukan analisis grafik dan uji statistik lainnya yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji non parametik

kolmogorov-smirnov (K-S). Jika signifikan pada uji ini lebih besar dari $\alpha = 0,05$ berarti data terdistribusi dengan normal.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan terdapat hubungan antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Diasumsikan bahwa masing-masing variabel X tidak saling berkorelasi linear. Sesungguhnya multikolinearitas itu tetap ada pada setiap variabel independen, hanya saja harus dipastikan apakah multikolinearitas yang ada masih dalam batas penerimaan atau tidak. Untuk mendeteksinya, dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *variance inflation faktor* (VIF) untuk tiap-tiap variabel independen. Menurut Santoso pada umumnya jika VIF besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.

3.6.3.2 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varian. Prasyarat terpenuhi adalah dalam model regresi tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

3.6.3.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan Uji Durbin-Watson (uji DW).

3.6.4 Uji Hipotesis

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Persamaan regresi yang dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

$$Y = + X_1 + X_2 + X_3 + X_4 +$$

Dimana,

$$\begin{aligned} Y &= \text{Kemauan Membayar Pajak (Willingness to Pay Tax)} \\ &= \text{Konstanta} \\ &= \text{Koefisien Regresi} \\ X_1 &= \text{Kesadaran Membayar Pajak} \\ X_2 &= \text{Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan} \\ X_3 &= \text{Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan} \\ X_4 &= \text{Tingkat Pendidikan} \\ &= \text{Error} \end{aligned}$$

3.6.4.1 Analisis Korelasi Berganda (Uji R)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen.

Hasil analisis korelasi bergandanya dapat dilihat dari hasil analisis regresi pada nilai R dalam output *model summary*.

3.6.4.2 Analisis Determinasi (R^2)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variabel-variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel dependen. R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau 100%. Dalam analisis regresi, hasil analisis Determinasi (R^2) dilihat pada tampilan Output SPSS *model summary*. (Priyatno, 2009:79).

3.6.4.3 Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam regresi variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Nilai F hitung dilihat dari output SPSS pada tabel ANOVA^b (Priyatno, 2009:81),

Kriteria yang digunakan untuk menolak atau menerima hipotesis adalah:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka Hipotesis diterima.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka Hipotesis ditolak.

3.6.4.4 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) (Priyatno, 2009:83). Nilai T hitung dilihat dari output SPSS pada tabel *Coefficients*^a.

Kriteria yang digunakan untuk menerima dan menolak hipotesis adalah:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Hipotesis diterima.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka Hipotesis ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi dan Analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan penyebaran kuisioner kepada responden yaitu pemilik usaha kecil menengah pada kota Bangkinang. Kuisioner disebar dengan cara mengantar langsung kepada responden yaitu pemilik usaha kecil menengah pada kota Bangkinang. Setelah kuisioner ini diisi oleh responden, peneliti mengambil kembali untuk selanjutnya ditabulasi dan diolah dengan menggunakan *Statistical Package for Social Science* (SPSS) Versi 16,0. Penyebaran kuisioner dimulai tanggal 4 Januari 2013 sampai tanggal 12 Januari 2013.

Jumlah kuisioner yang diedarkan kepada responden adalah sebanyak 92 kuisioner. Kuisioner yang dapat dikumpulkan atau kembali yaitu sebanyak 92 kuisioner, semua kuisioner yang terkumpul dapat memenuhi syarat untuk diolah yaitu 92 kuisioner. Tingkat pengumpulan kuesioner dapat dilihat pada tabel IV.1.

Tabel IV.1 Tingkat Pengembalian Kuisioner

KETERANGAN	Total
Total kuisioner yang disebar	92
Total kuisioner yang terkumpul kembali	92
Total kuisioner yang dapat di olah	92
Persentase pengembalian kuisioner (92/92 x 100%)	100%

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel IV.1 dapat dijelaskan bahwa peneliti menyebarkan 92 kuisioner. Kuisioner yang terkumpul kembali sebanyak 92 kuisioner atau 100%. Jadi, total kuisioner yang dapat diolah dari jumlah keseluruhan kuisioner yang disebarkan adalah 92 kuisioner atau 100%.

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 92 responden. Data mengenai karakteristik responden adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2 Profil Responden

Keterangan	Frekuensi	Persentasi
Jenis Kelamin		
a. Pria	71	77,1%
b. Wanita	21	22,9%
Umur		
a. 21- 30 tahun	23	25,0%
b. 31 - 40 tahun	52	56,5%
c. > 40 tahun	17	18,5%
Pendapatan perbulan :		
a. 5 - 25 juta	52	56,5%
b. 26 – 50 juta	31	33,6%
c. 51- 250 juta	9	9,7%
d. 250- 500 juta	-	
e. >500 juta	-	
Pendidikan terakhir :		
a. SD/Sederajat	1	1,1
b. SMP/ Sederajat	3	3,3
c. SMA/Sederajat	41	44,5%
d. S1/Sederajat	47	51,1%
Jenis pekerjaan :		
a. Perdagangan	48	52,2%
b. Jasa	44	47,8%

Sumber : Data olahan

Tabel IV.2 menunjukkan mayoritas responden berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 71 orang atau 77,2% dan responden yang berjenis kelamin wanita sebanyak 21 orang atau 22,9%. Responden yang memiliki umur 21- 30 tahun adalah 23 orang atau 25 % , umur 31 - 40 tahun adalah 52 atau 56,5% dan umur > 40 tahun adalah 17 orang atau 18,5%. Mayoritas responden dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 47 orang atau 51,1% , responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 41 orang atau 44,5%, responden dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 3 orang atau 3,3% dan SD sebanyak 1 orang atau 1,1%. Jenis pekerjaan yang di miliki responden perdagangan sebanyak 48 orang atau 52,2% , dan jasa sebanyak 44 orang atau 47,8%.

Analisis data dilakukan terhadap 92 sampel responden yang memenuhi kriteria untuk dapat diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan data statistic deskriptif ditunjukkan pada tabel VI.3 dibawah ini :

Tabel VI.3 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Membayar Pajak	92	8	20	16.10	2.382
Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan	92	11	30	23.74	3.823
Persepsi Yang Baik Efektifitas Sistem Perpajakan	92	5	25	12.16	5.618
Tingkat Pendidikan	92	6	15	11.82	2.086
Kemauan Membayar Pajak	92	7	25	20.57	2.833
Valid N (listwise)	92				

Sumber: Output SPSS 16.

Berdasarkan tabel VI.7 terlihat bahwa nilai jawaban semua responden terhadap kesadaran membayar pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 16,10, pemahaman terhadap peraturan perpajakan mempunyai nilai rata-rata sebesar

23,74, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai nilai rata-rata sebesar 12,16, tingkat pendidikan mempunyai nilai rata-rata sebesar 11,82, kemauan membayar pajak mempunyai nilai minimum rata-rata sebesar 20,57.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Uji Kualitas Data

4.2.1.1 Uji Validitas

Dalam pengujian yang peneliti lakukan untuk mengetahui kualitas data, layak atau tidaknya suatu data untuk diangkat, maka peneliti menganalisis data dengan cara mengkorelasikan masing-masing scor item dengan scor total. Scor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan scor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Dan dalam uji validitas yang peneliti lakukan, peneliti menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson) dan dilakukan dengan *one shot method*, yaitu metode yang dilakukan sekali pengukuran saja.

Kuesioner dapat dikatakan valid jika nilai Pearson Korelasi lebih besar dari nilai r tabel untuk 92 responden dengan signifikansi 0,05 yaitu $df=(n-2)=90$ yaitu sebesar 0,208. Untuk variable independen dan dependen, dari hasil uji validitas dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel IV.4 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Item Pertanyaan	Pearson Correlatic	Kesimpulan
1	Kesadaran Membayar Pajak (X1)	Q.1	0,697	Valid
		Q.2	0,766	Valid
		Q.3	0,681	Valid
		Q.4	0,803	Valid
2	Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan (X2)	Q.5	0,766	Valid
		Q.6	0,753	Valid
		Q.7	0,782	Valid
		Q.8	0,739	Valid
		Q.9	0,789	Valid
		Q.10	0,657	Valid
3	Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X3)	Q.11	0,887	Valid
		Q.12	0,889	Valid
		Q.13	0,929	Valid
		Q.14	0,847	Valid
		Q.15	0,939	Valid
4	Tingkat Pendidikan (X4)	Q.16	0,866	Valid
		Q.17	0,814	Valid
		Q.18	0,782	Valid
5	Kemauan Membayar Pajak (Y)	Q.19	0,757	Valid
		Q.20	0,778	Valid
		Q.21	0,708	Valid
		Q.22	0,752	Valid
		Q.23	0,697	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS 16.

Dari tabel VI.4 dapat dijelaskan bahwa yang mempengaruhi kemauan membayar pajak diukur dengan 23 item pertanyaan yang terdiri dari :

- 1) Kesadaran membayar pajak diukur dengan 4 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,681, artinya semua item pertanyaan diatas 0,208 dan memenuhi syarat untuk valid.

- 2) Pemahaman terhadap peraturan perpajakan diukur dengan 6 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,657, artinya semua item pertanyaan diatas 0,208 dan memenuhi syarat untuk valid.
- 3) Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan diukur dengan 5 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,847, artinya semua item pertanyaan diatas 0,208 dan memenuhi syarat untuk valid.
- 4) Tingkat pendidikan diukur dengan 3 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,782, artinya semua item pertanyaan diatas 0,208 dan memenuhi syarat untuk valid.
- 5) Kemauan membayar pajak diukur dengan 5 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,697, artinya semua item pertanyaan diatas 0,208 dan memenuhi syarat untuk valid.

4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha* menggunakan SPSS. Suatu variable dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Hasil uji reliabilitas data dapat dilihat pada tabel VI.5 dibawah ini:

Tabel IV.5 Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Jumlah Item Pertanyaan	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Kesadaran Membayar Pajak (X1)	4	0,720	Reliabel
2	Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan (X2)	6	0,841	Reliabel
3	Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X3)	5	0,938	Reliabel
4	Tingkat Pendidikan (X4)	3	0,759	Reliabel
5	Kemauan Membayar Pajak (Y)	5	0,791	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS

Hasil pengujian reabilitas yang disajikan paada tabel VI.5 menunjukkan tidak ada koefisien *Cronbach Alpha* yang kurang dari 0,60. Sehingga instrument tersebut reliable untuk digunakan.

4.2.2 Uji Normalitas

Pengujian normalitas adalah uji untuk melihat apakah distribusi residual mengikuti distribusi normal atau tidak, atau menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable dependen, variable independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap normalitas untuk mengetahui metode statistik yang akan digunakan.

Pengujian normalitas dapat digunakan dengan menggunakan *one sampel kolmogorov smirnov test* dengan melihat signifikan 5 %. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini adalah melihat nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data mempunyai distribusi tidak normal.

Uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.6 Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Kesadaran Membayar Pajak	Pemahaman Peraturan Perpajakan	Persepsi yang Baik atas ESP	Tingkat Pendidikan	Kemauan Membayar Pajak
N		92	92	92	92	92
Normal Parameters ^a	Mean	16.10	23.74	12.16	11.82	20.57
	Std. Deviation	2.382	3.823	5.618	2.086	2.833
Most Extreme Differences	Absolute	.212	.119	.172	.166	.138
	Positive	.104	.067	.172	.106	.067
	Negative	-.212	-.119	-.101	-.166	-.138
Kolmogorov-Smirnov Z		2.032	1.141	1.646	1.590	1.327
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001	.148	.009	.013	.059

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output SPSS 16

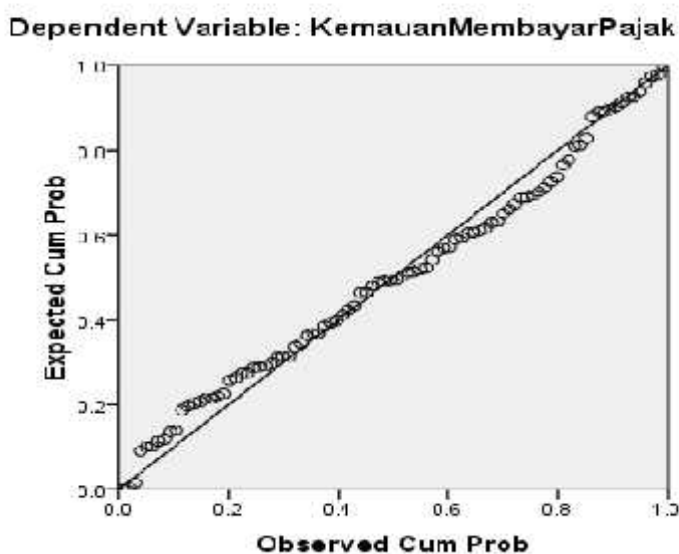
Tabel IV.6 menunjukkan nilai K-S-Z untuk variabel kesadaran membayar pajak adalah sebesar 2,032 dengan signifikansi sebesar 0,001. Nilai K-S-Z untuk variabel pemahaman terhadap peraturan perpajakan adalah sebesar 1,141 dengan signifikansi sebesar 0,148. Nilai K-S-Z untuk variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan adalah sebesar 1,646 dengan signifikansi sebesar 0,009, nilai K-S-Z untuk variabel tingkat pendidikan adalah sebesar 1,590 dengan signifikansi sebesar 0,013. Nilai K-S-Z semua variabel tersebut diatas 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel secara statistik telah terdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

Deteksi normalitas juga dapat dilihat dengan menggunakan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Pada gambar terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis

diagonal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas seperti terlihat pada gambar IV.1.

Gambar IV.1 Diagram P-P Plot Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Output SPSS 16.

Pada gambar terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati besaran *varians inflation factor* (VIF) dan *Tolerance*. Jika VIF lebih besar dari 10 atau nilai *tolerance* $< 0,10$ maka variable tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variable bebas lainnya. Besarnya VIF dan *tolerance* pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV.7 Nilai tolerance dan VIF**Coefficients^a**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kesadaran Membayar Pajak	.802	1.247
Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan	.642	1.558
Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan	.949	1.054
Tingkat Pendidikan	.678	1.475

a. Dependent Variable: KemauanMembayarPajak

Sumber: Output SPSS 16

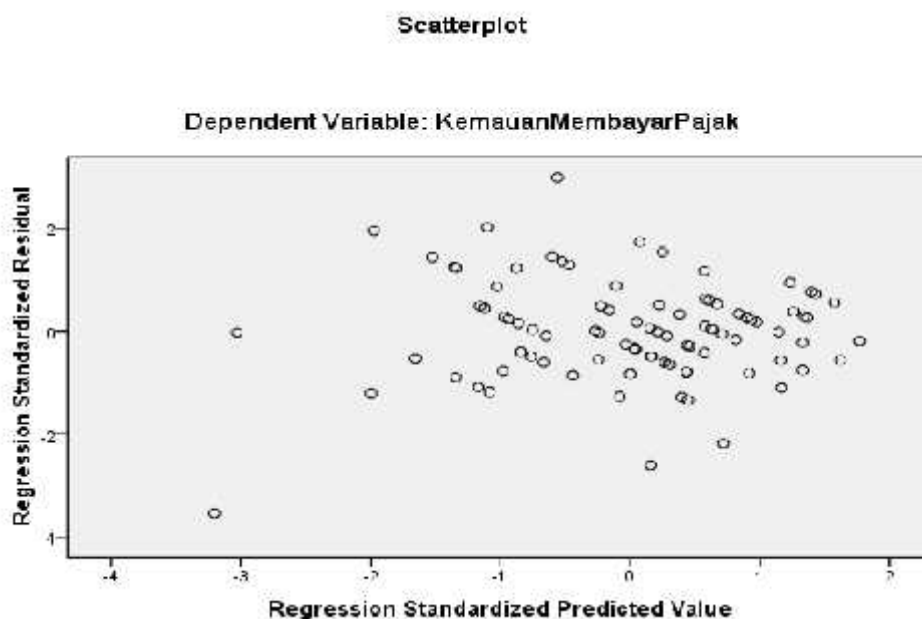
Dari tabel IV.7 menunjukkan variable kesadaran membayar pajak mempunyai nilai tolerance sebesar 0,802 sedangkan nilai VIF 1,247, variabel pemahaman terhadap peraturan perpajakan mempunyai nilai tolerance sebesar 0,642 sedangkan nilai VIF 1,558, variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan mempunyai nilai tolerance sebesar 0,949 sedangkan nilai VIF 1,054, tingkat pendidikan mempunyai nilai tolerance sebesar 0,678 sedangkan nilai VIF 1,475. Dari semua variabel independen tidak ada nilai VIF diatas 10, berarti tidak terdapat gangguan multikolinearitas pada penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini penelitian ini bebas dari gangguan multikolinearitas dan layak digunakan.

4.2.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat melihat grafik *scatterplot*. Deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu

X adalah Y menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Seperti terlihat pada gambar V.2.

Gambar IV.2 Scatterplot Heteroskedastitas



Sumber: Output SPSS 16

Pada gambar IV.2 tidak terlihat pola yang jelas karena titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

4.2.3.3 Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada atau tidak nya autokorelasi dengan mendeteksi besaran *Durbin-Watson*. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat angka *Durbin-Watson*. Secara umum bisa diambil patokan :

1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada Autokorelasi positif
2. Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi

3. Angka D-W di atas +2 berarti ada Autokorelasi negatif.

Tabel IV.8 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.760 ^a	.577	.558	1.885	1.791

a. Predictors: (Constant), TingkatPendidikan, PersepsiYgBaikESP, KesadaranMembayarPajak, PemahamanterhadapPeraturanPerpajakan

5. Dependent Variable: KemauanMembayarPajak

Sumber: Output SPSS 16

Pada tabel tersebut dapat dilihat nilai statistik *Durbin-watson* sebesar 1,791. Angka *Durbin-Watson* dibawah 2 yaitu sebesar 1,791 yang berarti tidak ada autokorelasi. Dan dapat disimpulkan bahwa regresi ini baik karena bebas dari autokorelasi.

4.2.4 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 16.0, dimana semua variabel dimasukkan untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui meregresikan kesadaran membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat pendidikan terhadap kemauan membayar pajak sebagai variabel dependen. Hasil regresi seperti yang tercantum dalam Tabel IV.9.

Tabel IV.9.Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.823	1.778		2.150	.034		
Kesadaran Membayar Pajak	.200	.093	.168	2.160	.033	.802	1.247
Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan	.360	.065	.486	5.587	.000	.642	1.558
Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan	.035	.036	.069	.963	.338	.949	1.054
Tingkat Pendidikan	.385	.115	.283	3.343	.001	.678	1.475

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

Sumber: Output SPSS 16

Persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

$$Y \text{ (Kemauan membayar pajak)} = 3,823 + 0,200X_1 + 0,360X_2 + 0,035X_3 + 0,385X_4 + e$$

- 1) Konstanta sebesar 3,823 menyatakan, bahwa jika variabel independen tetap maka variabel dependen adalah sebesar 3,823.
- 2) Hasil regresi X_1 menunjukkan variabel kesadaran membayar pajak sebesar 0,200 yang menyatakan bahwa apabila kesadaran membayar pajak mengalami kenaikan 1 poin sedangkan variabel lain dianggap tetap, maka variabel dependen (kemauan membayar pajak) akan mengalami kenaikan sebesar 0,20.
- 3) Hasil regresi X_2 menunjukkan variabel pemahaman terhadap peraturan perpajakan sebesar 0,360 yang menyatakan bahwa apabila pemahaman terhadap peraturan perpajakan mengalami peningkatan 1 poin sedangkan

variabel lain dianggap tetap, maka variabel dependen (kemauan membayar pajak) akan mengalami peningkatan sebesar 0,360.

- 4) Hasil regresi X_3 menunjukkan variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan sebesar 0,035 yang menyatakan bahwa apabila persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mengalami peningkatan 1 poin sedangkan variabel lain dianggap tetap, maka variabel dependen (kemauan membayar pajak) akan mengalami peningkatan sebesar 0,035.
- 5) Hasil regresi X_4 menunjukkan variabel tingkat pendidikan sebesar 0,385 yang menyatakan bahwa apabila tingkat pendidikan mengalami peningkatan 1 poin sedangkan variabel lain dianggap tetap, maka variabel dependen (kemauan membayar pajak) juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,385.

4.2.4.1 Uji Secara Parsial (Uji T)

1. Variabel Kesadaran Membayar Pajak

H1 : Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

Berdasarkan statistik t hitung sebesar $2,160 > t$ tabel sebesar 1,988 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,033 < = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa H1 diterima dan kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil menengah untuk membayar pajak pada kota Bangkinang.

2. Variabel Pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

H2 : Pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan statistik t hitung sebesar $5,587 > t$ tabel sebesar 1,988 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,000 < = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa H2 diterima dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil menengah untuk membayar pajak pada kota Bangkinang.

3. Variabel Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan

H3 : Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan statistik t hitung sebesar $0,963 < t$ tabel sebesar 1,988 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,338 > = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa H3 di tolak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil menengah untuk membayar pajak pada kota Bangkinang.

4. Tingkat Pendidikan.

H2 : Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan statistik t hitung sebesar $3,343 > t$ tabel sebesar 1,988 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,001 < = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa H4 diterima dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil menengah untuk membayar pajak pada kota Bangkinang.

4.2.4.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

H5 : Kesadaran membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem

perpajakan, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independent atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependent atau terikat. Untuk membuktikan hal tersebut, maka dilakukan uji F. Hasil uji regresi secara simultan atau uji F dapat dilihat pada tabel IV.10.

**Tabel IV.10 Hasil Uji F Hitung
ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	421.616	4	105.404	29.677	.000 ^a
Residual	308.993	87	3.552		
Total	730.609	91			

a. Predictors: (Constant), TingkatPendidikan, PersepsiYgBaikESP, KesadaranMembayarPajak, PemahamanterhadapPeraturanPerpajakan

b. Dependent Variable: KemauanMembayarPajak

Sumber: Output SPSS 16

Pada Tabel IV.14 hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar $29,677 > F$ tabel sebesar 2,476, dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,00 < = 0,05$ maka hipotesis diterima. Maka model regresi menunjukkan bahwa H5 di terima dan secara bersama-sama kesadaran membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil menengah untuk membayar pajak di kota Bangkinang.

4.2.4.3 Analisis Korelasi Ganda (R)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 , X_4) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi adalah antara 0,00–0,199 adalah sangat rendah, antara 0,20-0,399 adalah rendah, 0,40-0,599 adalah sedang, 0,60-0,799 adalah kuat dan antara 0,80-1,0 adalah sangat kuat.

Tabel IV.11 Hasil Analisis Korelasi Ganda
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.760 ^a	.577	.558	1.885	1.791

a. Predictors: (Constant), TingkatPendidikan, PersepsiYangBaikESP, KesadaranMembayarPajak, PemahamanterhadapPeraturanPerpajakan

b. Dependent Variable: KemauanMembayarPajak

Sumber: Output SPSS 16

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka R sebesar 0,760. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara kesadaran membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kemauan membayar pajak.

4.2.4.4 Analisis Determinasi (R²)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentasi sumbangan pengaruh variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 , X_4) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa

besar persentase variabel-variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai R (koefisien determinasi) terlihat pada Tabel IV.12 berikut :

Tabel IV.12 Hasil Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.760 ^a	.577	.558	1.885	1.791

a. Predictors: (Constant), TingkatPendidikan, PersepsiYangBaikESP, KesadaranMembayarPajak, PemahamanterhadapPeraturanPerpajakan

b. Dependent Variable: KemauanMembayarPajak

Sumber: Output SPSS 16

Tabel IV.12 menunjukkan nilai R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,577 yang artinya 57,7% dari variabel dependen (kemauan membayar pajak) dipengaruhi oleh variabel independen (kesadaran membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat pendidikan). Atau variabel independen yang digunakan dalam model (kesadaran membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat pendidikan) mampu menjelaskan sebesar 57,7% variabel dependen (kemauan membayar pajak.).

Sedangkan sisanya sebesar 42,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain seperti rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, kepuasan terhadap pelayanan pemerintah, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum/ sanksi pajak, pemeriksaan pajak, tarif pajak, kondisi sosial, moral masyarakat (Rahayu 2010: 139-145).

4.3 Pembahasan

1. Kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.

Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan kesadaran membayar pajak, yaitu t hitung 2,160 > t tabel 1,988 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,033 berada dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pancawati (2011) yang menunjukkan kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Tapi tidak sesuai dengan penelitian Widayati (2010) yang menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan penelitian Pancawati (2011), hal ini berarti sikap wajib pajak tentang kesadaran terhadap perpajakan cukup baik. Kesadaran wajib pajak cukup dimengerti oleh masyarakat, di mana masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak secara berkala berguna untuk perkembangan dan pembangunan negara secara khusus dan untuk kepentingan masyarakat luas. Selain itu semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kemauan membayar pajak. Hal ini perlu dipertahankan oleh pihak-pihak yang terkait agar para wajib pajak tetap sadar akan pajak dan mereka telah mempunyai pandangan positif terhadap pajak.

2. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, yaitu $5,587 > t$ tabel 1,988 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,000 berada dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Pancawati (2011) yang menunjukkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Dan sesuai dengan penelitian Widayati (2010) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak pada peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Semakin besar pemahaman terhadap perpajakan maka semakin besar kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan sudah cukup baik. Oleh karena itu wajib pajak juga akan sadar tentang kemauan membayar pajak.

Berdasarkan penelitian Fery Dwi Prasetyo (2006), wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan

perpajakan dengan sangat baik, akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan yang tercantum didalam peraturan yang ada.

3. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, yaitu t hitung $0,963 < t$ tabel $1,988$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,338$ berada diatas $0,05$. Hal ini menunjukkan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Pancawati (2011) dan Penelian Widayati (2010) yang menunjukkan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pemahaman terhadap peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini terjadi karena cara-cara yang dilakukan dalam sistem perpajakan masih kurang dipahami dan bahkan tidak diketahui oleh wajib pajak. Umumnya masyarakat masih tidak memahami tentang sistem-sistem perpajakan yang ada, padahal sistem tersebut sebenarnya di diciptakan untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban mereka dalam membayar pajak.

Harapan kepada aparat pajak adalah perlu diadakannya pelatihan atau sosialisasi sehubungan dengan sistem perpajakan yang ada, baik itu mengenai pelaporan pajak melaui e-SPT, pembayaran pajak melalui e-

banking, pendaftaran NPWP melalui e-Registrasi dari *webside* pajak. Suatu pelatihan atau sosialisasi tersebut akan menambah pemahaman wajib pajak akan sistem perpajakan yang ada, sehingga akan menambah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan yang telah digunakan oleh dirjen pajak. Dan akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kemauan wajib pajak khususnya pemilik usaha kecil menengah untuk membayar pajak.

4. Tingkat pendidikan terhadap kemauan membayar pajak.

Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan tingkat pendidikan, yaitu t hitung $3,343 > t$ tabel 1,988 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,001 berada dibawah 0,05. Hal Ini menunjukkan tingkat pendidikan secara signifikan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Zulia Hanum (2010) menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak lewat pendidikan yang lebih tinggi seharusnya memiliki kesadaran perpajakan (kemauan membayar pajak) yang lebih baik dibanding dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih rendah.

Hal ini berarti bahwa pendidikan yang diterima oleh wajib pajak sudah cukup mampu membuat seorang wajib pajak memiliki kemauan membayar pajak. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan pajak juga didapat lewat pendidikan yang telah ditempuh wajib pajak. Pendidikan wajib pajak telah mampu menciptakan budi pekerti yang baik pada wajib pajak hingga membuka pikiranya tentang pentingnya pembayaran pajak mereka dalam meningkatkan pendapatan negara.

Pendidikan tersebut akan menimbulkan kesadaran wajib pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kemauan membayar pajak pada wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan yang secara ringkas disajikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji t secara parsial bahwa hasil regresi menunjukkan kesadaran membayar pajak, yaitu $t \text{ hitung } 2,160 > t \text{ tabel sebesar } 1,988$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,033 berada dibawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
2. Berdasarkan hasil uji t secara parsial bahwa hasil regresi menunjukkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, yaitu $t \text{ hitung } 5,587 > t \text{ tabel sebesar } 1,988$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,00 berada dibawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
3. Berdasarkan hasil uji t secara parsial bahwa hasil regresi menunjukkan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, yaitu $t \text{ hitung } 0,963 < t \text{ tabel sebesar } 1,988$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,338 berada diatas 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

4. Berdasarkan hasil uji t secara parsial bahwa hasil regresi menunjukkan tingkat pendidikan, yaitu $t \text{ hitung } 3,343 > t \text{ tabel sebesar } 1,988$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,01 berada dibawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan secara signifikan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
5. Secara Simultan (Uji F), nilai F hitung sebesar $29,677 > F \text{ tabel } 2,476$. Dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,00 Berada di bawah 0,5. Maka model regresi menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
6. Nilai R sebesar 0,760, ini menunjukkan bahawa terjadi hubungan yang kuat antara kesadaran membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kemauan membayar pajak.
7. Dan nilai R square pada penelitian ini adalah 0,577 atau 57,7% Hal ini menunjukkan bahwa persentasi sumbangan pengaruh variable independen (kesadaran membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat pendidikan) mampu menjelaskan sebesar 57,7% variasi variabel dependen (kemauan membayar pajak) sedang sisanya sebesar 42,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variable lain seperti manfaat yang dirasakan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sangsi pajak dan variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk pemilik usaha kecil menengah sebagai wajib pajak diharapkan senantiasa meningkatkan kemauan membayar pajak. Karena seperti yang kita ketahui pajak merupakan penyumbang persentase terbesar dalam pendapatan negara. Dan pembangunan negara sangat tergantung pada jumlah pajak yang dibayar masyarakat pada negara.
2. Pada Dirjen Pajak supaya lebih meningkatkan sosialisasi melalui program khusus tentang sistem perpajakan pada masyarakat yang ada di kota-kota kecil seperti kota Bangkinang. Karena pemahaman masyarakat terutama pada kalangan masyarakat menengah kebawah masing sangat rendah. Apalagi pemahaman dibidang sistem atau program-program Dirjen pajak seperti e-SPT, drop box, e-Registration dan lain-lain. Pada umumnya masyarakat menengah kebawah tidak memahami tentang itu.
3. Pada penelitian-penelitian mendatang disarankan untuk dilakukan pengujian ulang terhadap model penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain. Diharapkan model selanjutnya akan lebih baik dibandingkan model penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada pemilik usaha kecil menengah yang ada di kota Bangkinang. Maka disarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih luas, agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan dan Ishak. 2005. *Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Damayanti, Titien. 2010. *Pengaruh Pendidikan Tinggi Akuntansi Terhadap Kecerdasan Emosional Dengan On-The Job Training Sebagai Variabel Moderatin*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XII.
- Devano. S dan Siti Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Dwi, Ferry Prasetyo. 2006. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Jogjakarta*. Skripsi Strata-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hanum, Zulia. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Kota Medan*. Penelitian dosen Fakultas Ekonomi UMSU.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Skripsi Stata 1. Universitas Stikubank.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Edisi Ketiga. Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit: Balai Pustaka.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. EDISI Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurnia, Siti dan Eli Suhayati. 2009. *Perpajakan Teori dan Teknik Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kurnia, Siti Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Liana Ekawati. 2009. *Pengaruh Persepsi Sangsi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jogja*. Skripsi Universitas Komunikasi Indonesia
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

- Muflih, Muhammad, 2006. *Prilaku Konsumen dalam Prespektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta :Rajawali Pers.
- Nugroho, M Awal Satrio dan Bambang Teguh. (2008). *Hal dan Kewajiban dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marihot, P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Priyatno,Dwi. 2009. *Mandiri SPSS* . Jakarta: Media Kom.
- Rakhmad, Jalaludin, 2007, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Riyono, Edi. 2011. *Pengaruh Pendidikan dan Pendapatan terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kec. Jatiyoso*. Skripsi S1. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Suryadi. (2006). *Model Kausal Kesadaran,Pelayanan,Kepatuhan Wajib Pajak,Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak:Suatu Survey di wilayah Jatim*. Jurnal Keuangan Publik.Volume 4.No.1:105-121.
- Tambunan, Tulus. 2009. *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tuti Surliani. 2011. *Pengaruh Pengawasan dan Evaluasi Pemberi Kredit terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Teluk Kuantan*. Skripsi Strata 1. Uin Suska Riau.
- Widayati. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*, Makalah Simposium Nasional Akuntansi XII.
- Umar, Husien. 2004. *Riset Akuntansi Metode Riset Sebagai Cara Penelitian Ilmiah*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 BukuI* . Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo dan Ilyas. (2003). *Perpajakan Indonesia (Edisi Revisi)*. Buku 1.
Jakarta : Salemba Empat.